

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
PANJA SELEKSI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2019-2020  
DAN PENYELESAIAN PENANGANAN MASALAH TENAGA HONORER  
DI BKN KANREG XII KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU  
KAMIS, 13 FEBRUARI 2020**

---

## **I. PENDAHULUAN**

Sebagaimana diketahui Pemerintah telah mengumumkan penerimaan CPNS tahun 2019 dan menetapkan pelaksanaan tersebut pada bulan-bulan mendatang secara bersamaan di seluruh instansi pusat dan daerah, kota/kabupaten serta provinsi. Penerimaan CPNS 2019 yang dilakukan secara serentak harus diimbangi dengan kesiapan setiap daerah untuk melaksanakan proses penerimaan CPNS serta koordinasi yang terus menerus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Persiapan tersebut terkait dengan formasi dan jumlah kebutuhan CPNS.

Dalam kerangka tersebut, maka proses penerimaan dan pembinaan karir PNS harus dipastikan memenuhi syarat-syarat administrasi dan manajemen personil yang baik, seperti analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kinerja, evaluasi jabatan. Proses administrasi dan manajemen personil yang baik akan mewujudkan budaya birokrasi Indonesia yang profesional. Sehingga memudahkan langkah dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia.

Mengingat pelamar CPNS sangat banyak maka penerimaan CPNS 2019-2020 harus diimbangi dengan kesiapan setiap instansi terkait untuk kelancaran proses penerimaan CPNS tersebut. Untuk itu diperlukan koordinasi intensif dan terus menerus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dengan instansi-instansi terkait lainnya agar penyelenggaraan rekrutmen tersebut berjalan dengan baik.

Sebagai mitra kerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang merupakan instansi yang mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS, Komisi II DPR RI RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2019-2020 harus dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pengawasan, Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorar berdasarkan hasil rapat intern Komisi II DPR. Selanjutnya sebagai langkah awal, maka Tim Panja ini melakukan kunjungan spesifik ke Kantor regional (Kanreg) XII di Kota Pekanbaru provinsi Riau tanggal 13 Februari 2020 untuk memantau penerimaan CPNS 2019-2020 dan persoalan tenaga honorer yang ada.

Tim Kunjungan Komisi II DPR RI ke Kanreg XII BKN Pekanbaru berjumlah **10 orang** anggota yang dipimpin oleh Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI, **Yth. Bapak H. Arwani Thomafi/Fraksi PPP** beserta anggota tim yang terdiri dari:

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1	A-467	H. ARWANI THOMAFI	KETUA TIM/ KETUA KOMISI II/F-PPP
2	A-240	Drs. CORNELIS, MH	ANGGOTA/F-PDI-P
3	A-152	Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc	ANGGOTA/F-PDI-P
4	A-186	PARYONO, S.H, M.H.	ANGGOTA/F-PDI-P
5	A-199	M. PRAKOSA	ANGGOTA/F-PDI-P
6	A-308	TETI ROHATININGSIH, S.Sos	ANGGOTA/F-GOLKAR
7	A-112	Drs. SUPRIYANTO	ANGGOTA/F-GERINDRA
8	A-386	KRISTIANA MUKI, S.Pd, M.Si	ANGGOTA/F-NASDEM
9	A.533	H. WAHYU SANJAYA, S.E	ANGGOTA/F-PD
10	A-455	KH. AUS HIDAYAT NUR	ANGGOTA/F-PKS
11	----	DAHLIYA BAHNAN, S.H, M.H	KASUBAG SET KOMISI II
12	----	SUGIAMAN, S.E	SEKRETARIAT KOMISI II
13	----	FADHILAH AFIFAH, S.M	SEKRETARIAT KOMISI II
14	----	EKO SUPRIYANTO	SEKRETARIAT KOMISI II
15	----	ALIM BATHORO	TENAGA AHLI KOMISI II
16	----	HESBUL BAHAR	TENAGA AHLI KOMISI II
17	----	DEVI IRIANDI	PEMBERITAAN
18	---	HILMAN HIDAYAT	TV PARLEMEN

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli dan 3 (tiga) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari TV parlemen dan 1 (satu) dari crew media sosial DPR RI.

## II. WAKTU DAN TEMPAT KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan kerja Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI Ke Kanreg XII BKN Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020. Pertemuan Kunjungan Kerja ini dilakukan di aula Kanreg XII BKN Pekanbaru, provinsi Riau.

## III. HASIL KUNJUNGAN

Tim Kunjungan kerja Panja Komisi II DPR tiba di kantor Kanreg XII BKN Pekanbaru disambut oleh jajaran pejabat Kanreg XII BKN, lalu melakukan peninjauan ujian *computer assisted test* (CAT) BKN, mulai dari meja pendaftaran verifikasi ulang kecocokan kartu peserta dengan peserta yang hadir, ruang tunggu peserta dan mengunjungi ruang ujian berbasis CAT.

Setelah melakukan kunjungan singkat, kemudian dilanjutkan pertemuan di lantai 1 ruang rapat Kanreg XII BKN Pekanbaru. Hadir pada pertemuan ini, Sekda provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid dan jajarannya, Deputy Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) ASN BKN, Suharmen, Direktur Kinerja Aparatur Sipil BKN, serta Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dan jajarannya.

Acara dibuka oleh Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Drs. Margi Prayitno, MAP, kemudian dilanjutkan perkenalan oleh ketua Tim Panja H. Arwani Thomafi. Dalam pengantarnya Ketua Tim Kunker Panja meminta Pemerintah Provinsi Riau dan

Kanreg XII BKN Pekanbaru dapat memberikan penjelasan terkait penerimaan CPNS 2019, dan penanganan permasalahan tenaga honorer. Setelah memberikan pengantar Ketua Tim Kunker memberikan kesempatan kepada Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) ASN, Suharmen dan Sekda provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid memberikan pemaparan.

#### 1. Sambutan Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Bapak Drs. Margi Prayitno, MAP

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 memiliki tugas untuk mengendalikan seleksi calon pegawai aparatur sipil negara. Kantor regional XII BKN yang berkedudukan di Pekanbaru mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN di wilayah kerjanya yang meliputi Instansi daerah dan pusat di provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS dilakukan dengan metode *computer assisted test* (CAT), yang difasilitasi oleh BKN ataupun dilakukan secara mandiri oleh instansi penyelenggara seleksi. Pada tahun 2020 kantor regional XII BKN melaksanakan seleksi nasional pengadaan CPNS formasi tahun 2019, untuk 40 instansi daerah, dan 44 instansi pusat. Formasi CPNS tahun 2019 untuk instansi daerah se Kanreg XII berjumlah 6.869 formasi dengan jenis formasi perbidang sebagai berikut:

No	Provinsi	Tenaga Pendidik	Tenaga Kesehatan	Tenaga Teknis	Jumlah Formasi
1	Sumatera Barat	1.052	584	670	2.306
2	Riau	1.619	738	1.036	3.393
3	Kepulauan Riau	391	247	532	1.170
<b>Total</b>		<b>3.062</b>	<b>1.569</b>	<b>2.238</b>	<b>6.869</b>

Sedangkan peserta SKD CAT CPNS formasi tahun 2019 untuk instansi daerah sebanyak 179.325 orang, dengan rincian peserta per provinsi sebagai berikut:

No	Provinsi	Jumlah Peserta
1	Sumatera Barat	66.056
2	Riau	92.472
3	Kepulauan Riau	20.797
<b>Total</b>		<b>179.325</b>

Pelaksanaan seleksi dijadwalkan mulai tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 1 Maret 2020. Saat ini seleksi memasuki tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD) CAT. Pelaksanaan pada tahapan ini, Kanreg XII BKN Pekanbaru memfasilitasi 40 instansi daerah dan 44 instansi pusat yang dilaksanakan di 33 titik lokasi tes, 10 instansi daerah menggunakan satu lokasi Gedung tes yang sama namun secara penganggaran dilakukan di masing-masing instansi daerah secara mandiri. Terdapat instansi pusat di wilayah kerja Kanreg XII yang melaksanakan SKD secara mandiri yakni Kementerian Hukum dan HAM. Pada saat pelaksanaan SKD, instansi

ini tidak menggunakan fasilitas CAT center milik Kanreg XII. Dalam pelaksanaannya seleksi mandiri ini didampi oleh PPSR BKN pusat. Sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan tugas meliputi fasilitas CAT BKN dengan kapasitas 200 PC *client* dan dukungan 34 server dari BKN pusat. Sedangkan tim pelaksana yang menjadi pelaksana seleksi ini adalah seluruh pegawai Kanreg XII BKN Pekanbaru yang berjumlah 92 orang.

Dalam melaksanakan tugas terkait pelaksanaan Seleksi CPNS 2019, Kanreg XXI BKN Pekanbaru telah melakukan koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis kepada seluruh instansi terkait, khususnya instansi yang berada di bawah naungan Kanreg XXI BKN Pekanbaru.

Meskipun demikian, ada beberapa kendala yang juga muncul dalam proses pelaksanaan SKD, seperti, *pertama* sebagian besar instansi belum mengetahui teknis penganggaran dan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan seleksi yang menggunakan sistem CTA. *Kedua*, ketergantungan instansi daerah kepada pihak ketiga dalam penyediaan sarana prasarana misalnya Gedung, PC *client*, dan lain-lain. *Ketiga*, keterbatasan SDM petugas CAT dengan jumlah 33 titik lokasi ujian. Terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul diatas, Kanreg XII mengadakan rakor persiapan penerimaan CPNS dengan mengundang PPSR sebagai narasumber dengan menghadirkan seluruh instansi daerah diwilayah kerjanya. serta berkoordinasi dengan instansi agar dapat melaksanakan ujian pada lokasi yang sama dan beberapa petugas melaksanakan tugas rangkap.

Seleksi penerimaan CPNS tahun 2019 di wilayah kerja Kanreg XII didukung oleh sumber daya yang dimiliki meliputi anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Seluruh proses seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019 ini bebas dari biaya. Kanreg XII BKN Pekanbaru tidak memungut atau menerima pembayaran dalam bentuk apapun baik dari peserta maupun instansi daerah/pusat yang difasilitasi. Hal ini merupakan suatu bentuk komitmen Kanreg XII BKN Pekanbaru untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang mumpuni dan berintegritas yang tinggi dalam melayani masyarakat.

## **2. Pemaparan Ketua Tim Panja Komisi II DPR RI Bapak H. Moh Arwani Thomafi**

Pada saat ini, sebagai perwujudan fungsi pengawasan salah satu fokus Komisi II DPR RI adalah berkaitan dengan Seleksi CPNS dan Penyelesaian Tenaga Honorer, khususnya yang THK-II. Dan komisi II DPR RI sudah membuat langkah-langkah serius dengan membentuk panja pengawasan terkait Seleksi CPNS dan Permasalahan Tenaga Honorer.

Kunjungan Tim Panja Komisi II DPR RI ke Kanreg XII BKN Pekanbaru adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan seleksi CPNS, yang saat ini sedang berlangsung dan telah sampai pada tahapan Ujian SKD. Selain itu kunjungan Tim Panja ini dimaksudkan mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan tenaga honorer. Dengan kunjungan ini, Tim Panja Komisi II DPR RI bisa melihat secara langsung terhadap proses seleksi yang berjalan di lapangan. Seleksi CPNS 2019-2020 diharapkan berlangsung baik, objektif, sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku serta menghasilkan PNS yang berkualitas.

BKN Kantor Regional XII Pekanbaru, membawahi tiga wilayah yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Secara khusus Tim Panja Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau ingin mengetahui beberapa hal berikut ini:

- a. Adanya temuan penentuan jumlah dan jenis formasi yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
- b. Adanya informasi bahwa penerimaan CPNS dan PPPK yang dilaksanakan pada setelah pengesahan APBD, sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran.
- c. Belum adanya *road map* jangka menengah (5 tahun) untuk penerimaan CPNS dan PPPK, termasuk alokasi formasi setiap tahun dan kalender tetap dalam pelaksanaan penerimaan CPNS dan PPPK, dikaitkan dengan akumulasi jumlah pensiunan.
- d. Perlunya rekrutmen CPNS dan PPPK agar mempertimbangkan faktor masa pengabdian tenaga honorer.
- e. Kejelasan penyelesaian status tenaga honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus dalam penerimaan PPPK pada Februari 2019.

Poin-poin permasalahan terkait seleksi CPNS dan Tenaga Honorer sudah disampaikan sebelumnya, dan penjelasan tertulisnya juga sudah ada untuk selanjutnya secara bersama-sama akan dilakukan pendalaman.

Hasil dari kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang penting bagi Tim Panja Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kepada pemerintah demi penyempurnaan seleksi CPNS dimasa mendatang. Adapun rekomendasi kepada pemerintah mengenai masalah tenaga honorer diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang sampai saat ini belum menemukan solusinya.

### **3. Pemaparan Direktur Kinerja Aparatur Sipil BKN, Suharmen, S.Kom., M.Si**

Tahapan seleksi CPNS, berpedoman kepada UU No 5 tahun 2014 tentang ASN dan peraturan turunannya, yakni mulai dari Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang memandatkan kepala BKN sebagai Ketua panitia seleksi nasional pengadaan CPNS, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 yang mengatur tentang Kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019, sampai dengan Peraturan BKN Nomor 50 Tahun 2019 yang mengatur tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN.

Kalau dilihat gambaran instansi yang melakukan pengadaan rekrutmen PNS, tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pengadaan seleksi PNS pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 terdapat 76 instansi ditingkat pusat, sedangkan dengan 2019 jumlah instansi yang mengikuti seleksi berkurang, kpada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 66 instansi saja. Penurunan jumlah instansi ditingkat pusat yang mengikuti pengadaan PNS dikarenakan ada beberapa instansi mengalami perubahan struktur organisasi seperti di Kementerian BUMN yang pejabat eselon 1 di Kementerian ini diganti semuanya sehingga tidak ada pejabat yang akan bertanggung jawab terhadap seleksi ini. Kasus berbeda yang terjadi di Kementerian Pariwisata, kementerian ini tidak melakukan seleksi

penerimaan CPNS dikarenakan sedang dilakukan proses reorganisasi internal paska penggabungan Badan ekonomi kreatif (Bekraf) kedalam Kementerian Pariwisata. Data instansi ditingkat daerah yang melakukan seleksi penerimaan CPNS tahun 2019 juga mengalami penurunan, ditahun 2018 sebanyak 525 instansi, sedangkan pada tahun 2019 hanya 456 daerah yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS. salah satu sebab penurunan ini dikarenakan ketersediaan anggaran daerah.

Jumlah pendaftar CPNS dalam seleksi CPNS tahun 2019 lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018, pendafar CPNS berjumlah 3.749.748 orang, dan yang dinyatakan lulus Administrasi berjumlah 2.763.478 orang. Sedangkan pada tahun 2019, pendaftar CPNS mencapai 4.197.218, dan yang lulus administrasi berjumlah 3364.864 orang. Hal itu berbanding terbalik dengan jumlah formasi yang diperebutkan. Pada seleksi CPNS tahun 2018, jumlah formasi berjumlah 238.015, jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah formasi tahun 2019 yang hanya berjumlah 150.315. Melihat tingginya peminat pendaftar CPNS dan menurunnya jumlah formasi yang tersedia pada tahun 2019 ini, peserta seleksi tidak hanya lolos sekedar *passing grade* saja, tapi harus lolos *passing grade* dan menjadi yang terbaik, dengan demikian kita berharap para peserta yang terpilih adalah benar-benar putra-putri terbaik bangsa yang akan menjadi ASN, baik disisi kemampuan wawasan kebangsaan, dari sisi intelegensi mereka ataupun dari sisi karakter pribadinya yang bersangkutan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Data detail jumlah formasi, jumlah peserta perbandingan peneriman CPNS tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dibawah ini:

	2018	2019	%
JUMLAH INSTANSI	601	522	(13,1)
a. PUSAT	76	66	(13,2)
b. DAERAH	525	456	(13,1)
JUMLAH FORMASI	238.015	150.315	(36,8)
a. PUSAT	51.271	36.935	(28,0)
b. DAERAH	186.744	113.380	(39,3)
JUMLAH PENDAFTAR	3.749.748	4.197.218	11,9
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI	2.921.814	4.197.218	43,7
a. LULUS ADMINISTRASI (MS)	2.763.478	3.364.867	21,8
b. TIDAK LULUS ADMINISTRASI (TMS)	158.336	832.351	425,7

TITIK LOKASI UJIAN	239	427	78,7
--------------------	-----	-----	------

Terkait kebijakan penurunan *passing grade* yang dikhawatirkan akan menurunkan kualitas PNS yang terpilih. BKN melakukan simulasi di tiga wilayah, yakni di Provinsi Aceh, Provinsi Bangka Belitung dan di Sulawesi Utara dengan peserta simulasi adalah PNS yang lulus pada tahun 2018, dari hasil simulasi kemudian ditentukan *passing grade* yang tepat dengan mempertimbangkan keterisian seluruh formasi yang tersedia, kebijakan *passing grade* ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN- RB No 23 tahun 2019.

Sedangkan terkait Tenaga Honorer yang ada di Kanreg XII BKN Pekanbaru, tenaga honorer K-I yang lulus sebanyak 2.558 orang dan yang tersisa sebanyak 50 orang dikarenakan beberapa faktor seperti telah melewati persyaratan minimum usia 35 tahun dan karena faktor durasi tahun pengangkatannya terpotong-potong dan tidak simultan. Untuk Tenaga Honorer K-II yang lulus sebanyak 9.869 orang dengan sisa yang diusulkan sebanyak 903 orang. Sisa usul ini muncul karena sebagian besar tidak memiliki surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) dari Pejabat Pembina Kepegawaian daerah.

#### **4. Pemaparan Sekretaris Daerah provinsi Riau, bapak Yan Prana Jaya Indra Rasyid**

Dalam pemaparannya, Sekda Provinsi Riau membacakan daftar pertanyaan kepada BKD provinsi yang telah dikirimkan sebelumnya, berikut pertanyaan dan jawabannya:

*1. Sejauhmana persiapan tes penerimaan seleksi CPNS 2019 yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Riau ?*

Persiapan seleksi penerimaan CPNS di provinsi Riau diawali dengan mengusulkan formasi CPNS sesuai surat Gubernur Riau nomor 800/BKD/1336 tanggal 26 Juni 2019 tentang penyampaian usulan kebutuhan ASN tahun 2019 serta surat Gubernur Riau nomor 800/BKD/2016 tanggal 22 Agustus 2019 tentang penyampaian revisi usulan kebutuhan ASN tahun 2019 kepada Menpan RB, selanjutnya Menpan RB menerbitkan persetujuan formasi Provinsi Riau berdasarkan penetapan kebutuhan PNS dilingkungan pemerintah provinsi Riau tahun anggaran 2019. Dengan demikian persiapan penerimaan CPNS telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam permenpan RB Nomor 23 tahun 2019 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019. Saat ini seleksi penerimaan telah selesai dilaksanakan yang dimulai dari tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020.

*2. Sejauhmana proses koordinasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan BKN dalam pengadaan CPNS 2019 seperti rencana pengisian formasi, penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja? Berapa formasi yang diusulkan dan berapa yang disetujui, apakah ada kendala?*

BKD Provinsi Riau telah melakukan koordinasi ke BKN dan rapat koordinasi dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, terkait sistem seleksi CPNS nacional dalam rangka penggunaan aplikasi SSCN, antara lain: tata cara pelaksanaan, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, memverifikasi persyaratan lamaran, melakukan pengawasan (supervisor), pengumuman lulus administrasi, sangah, jawaban sangah hingga penetapan calon peserta ujian dan pencetakan kartu ujian. Disamping itu juga dilakukan penyiapan ketersediaan sarana dan prasarana, kebutuhan waktu dan jumlah personil yang dibutuhkan untuk seleksi test kompetensi dasar.

3. *Terkait hal diatas, Komisi II DPR RI meminta data formasi yang diajukan dan disetujui oleh BKN Kanreg XII Pekanbaru berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di seluruh pemerintah daerah se Provinsi Riau?*

Berikut kami lampirkan formasi yang diusulkan kepada Menpan RB (terlampir)

4. *Dalam membuat analisis jabatan, analisis beban kerja BKD menyusun sendiri atau melibatkan pihak ketiga?*

Sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 33 tahun 2011 tentang analisis jabatan, dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Kepala BKN Nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan analisis jabatan, amanat penyusunannya dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau bersama masing-masing perangkat daerah. Namun demikian BKD Provinsi Riau berperan aktif dengan mengikutsertakan BKN Regional XII melakukan pendampingan dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dimaksud sehingga jabatan dan pemangku jabatan dapat dipetakan

5. *Komisi II DPR RI meminta data honorer K-II dan honorer non Kategori di Pemprov Riau?*

Berikut kami lampirkan data honorer K-II dan honorer non kategori di Provinsi Riau

6. *Berapa tenaga Honorer KII yang ikut tes CPNS 2018 dan 2019 dan seleksi PPPK tahun 2019 berapa yang lulus? Berapa yang sudah mendapat SK?*

Pemerintah Riau tidak mendapatkan formasi khusus untuk honorer K-II, sehingga tidak diketahui jumlah K-II yang mengikuti test dan lulus seleksi CPNS melalui formasi umum. Namun untuk K-II dibuka kesempatan mengikuti seleksi melalui jalur PPPK formasi guru dan dinyatakan lulus seleksi sebanyak 109 orang, dan dapat kami informasikan pula hingga saat ini yang bersangkutan belum menerima SK karena masih menunggu peraturan tentang sistema pengajiannya

7. *Sebagaimana isu yang berkembang, Pemerintah Provinsi Riau akan memberhentikan 15.000 tenaga honorer. Apakah hal tersebut telah dibuat kajian yang komprehensif? untuk menghindari konflik sosial pasca pemberhentian tenaga honorer KII dan non kategori?*



Belum ada wacana pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan pemberhentian terhadap 15.000 tenaga honorer, namun Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan penataan terhadap formasi tenaga honorer melalui seleksi kompetensi dengan menggunakan CAT (*commuter, assisted test*), sesuai Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor 209/SE/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Evaluasi Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, diminta agar setiap perangkat daerah tidak melakukan penambahan tenaga honorer selama proses evaluasi.

## 5. Pertanyaan anggota Panja Seleksi CPNS dan Penyelesaian Tenaga Honorer Komisi II DPR RI

### A. Tety Rohatiningih, S.Sos

Terkait formasi penerimaan CPNS di instansi daerah, kami mendapatkan aspirasi dari masyarakat pada saat melakukan kunjungan dapil, yakni tentang pentingnya formasi guru TK, memang sekilas pekerjaan guru TK sangat mudah, tapi jika kita menginginkan pembentukan karakter bangsa sejak dini, maka melalui pengadaan guru TK yang kompeten, memiliki wawasan dan komitmen kebangsaan mutlak dibutuhkan.

### B. Drs. Supriyanto

Dalam seleksi CPNS 2019 kami mengapresiasi BKN yang telah bekerja secara profesional, namun yang cukup disayangkan, sampai saat ini BKN belum mampu menyelesaikan permasalahan dengan tenaga honorer. Sampai saat ini kebijakan yang adil mengenai penggajian antara PNS dan tenaga honorer, padahal yang terjadi di daerah khususnya pada profesi guru, tenaga honorer telah bekerja secara maksimal. Terkait hal tersebut diatas, kami meminta tenaga honorer yang telah bekerja diatas 10 tahun bisa dimasukkan kedalam PPPK

### C. KH. Aus Hidayat Nur

Saya ingin menanyakan tentang dua hal, yakni *pertama* tentang sosialisasi ujian berbasis CAT yang dilakukan kepada peserta, perlu waktu berapa lama, *kedua*, sejauh ini apakah ada kendala teknis dalam pelaksanaan ujian berbasis CAT ini, jika ada bagaimana cara mengatasinya?

## IV. CATATAN KUNJUNGAN KERJA

1. Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI mendorong pemerintah agar segera memastikan roadmap penyelesaian Tenaga Honorer K-2 yang belum terakomodir.
2. Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI meminta seleksi penerimaan PPPK perlu dilakukan secara simultan sehingga dalam kurun waktu yang telah ditentukan permasalahan tenaga honorer bisa terselesaikan.
3. Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI meminta, dalam

menentukan formasi instansi daerah, Pemerintah perlu memperhatikan jumlah dan jenis formasi yang diajukan pemerintah daerah dengan tidak menafikan kajian analisis jabatan dan analisis beban kerja.

4. Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorar Komisi II DPR RI, meminta Pelaksanaan rektutmen CPNS dilaksanakan berdasarkan kalender kerja yang pasti demi kepastian penganggaran di daerah.

## **V. PENUTUP**

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorar Komisi II DPR RI ke Kantor Regional XXI BKN Pekanbaru pada tanggal 13 Februari 2020. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Februari 2020  
**KETUA TIM KUNJUNGAN SPESIFIK  
KOMISI II DPR RI**

**H. Moh Arwani Thomafi**  
**A-467**